

ANALISIS SENGKETA LAUT NATUNA DAN IMPLIKASINYA BAGI KEAMANAN REGIONAL

Irwan Triadi, Bayu Suryadi Manggala

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2110611029@mahasiswaupnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sengketa wilayah di Laut Natuna, yang dipengaruhi oleh konflik Laut Cina Selatan antara Tiongkok, Brunei, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Malaysia. Laut Natuna, bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas alam, serta merupakan jalur strategis perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana klaim kedaulatan teritorial di Laut Natuna mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Pasifik, dan bagaimana penyelesaian sengketa Laut Natuna mempengaruhi stabilitas keamanan regional, khususnya dalam konteks sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Tiongkok atas Laut Natuna menimbulkan ketegangan dengan Indonesia, yang mempengaruhi hubungan bilateral dan stabilitas regional. Penyelesaian sengketa ini memerlukan penguatan diplomasi maritim, pengawasan perbatasan, eksplorasi ekonomi di Natuna, serta peningkatan kemampuan pertahanan. Penyelesaian hukum internasional juga menjadi penting jika upaya diplomasi gagal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Natuna dapat terjaga.

Kata kunci: Sengketa, Laut Natuna, Diplomasi, Keamanan Regional

ABSTRACT

This research discusses the territorial dispute in the Natuna Sea, influenced by the South China Sea conflict involving China, Brunei, the Philippines, Vietnam, Taiwan, and Malaysia. The Natuna Sea, part of Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ), is rich in natural resources like oil and natural gas and is a strategic international trade route. The research method used is normative juridical, involving the analysis of relevant legislation and legal norms. The study aims to answer two main questions: how territorial sovereignty claims in the Natuna Sea affect Indonesia's relations with neighboring countries in the Asia-Pacific, and how the resolution of the Natuna Sea dispute impacts regional security stability, particularly concerning natural resources. The research findings indicate that China's claims over the Natuna Sea create tensions with Indonesia, affecting bilateral relations and regional stability. Resolving this dispute requires strengthening maritime diplomacy, border surveillance, economic exploration in Natuna, and enhancing defense capabilities. International legal resolution is also important if diplomatic efforts fail. With these measures, it is hoped that stability and security in the Natuna Sea region can be maintained.

Keywords: *Dispute, Natuna Sea, Diplomacy, Regional Security, Natural Resources*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan panas antara Tiongkok, Brunei, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Malaysia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah konflik Laut

Cina Selatan. Namun karena Laut Natuna Utara berada di bawah yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), maka sengketa Laut Cina Selatan juga berdampak pada Indonesia. Tindakan agresif yang dilakukan negara pengklaim dalam upaya mempertahankan klaim kepemilikannya di Laut Cina Selatan berdampak negatif terhadap kawasan otoritas ZEEI. Kawasan Laut Cina Selatan telah menjadi sumber penopang ekonomi bagi Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei selama beberapa generasi karena melimpahnya sumber daya alam, cadangan minyak, dan hasil laut. Tiongkok mengklaim bahwa mereka memiliki 95% wilayah Laut Cina Selatan dan berhak mengelolanya karena sejarah klaim mereka atas wilayah tersebut.¹ Sengketa wilayah maritim telah menjadi salah satu isu yang mendominasi perdebatan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Salah satu titik fokus utama dari sengketa ini adalah Laut Natuna, sebuah bagian penting dari Laut Cina Selatan yang terletak di wilayah perairan Indonesia. Pulau-pulau Natuna, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, telah menjadi pusat ketegangan antara negara-negara di sekitarnya, termasuk Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia. Sengketa Laut Natuna tidak hanya melibatkan klaim teritorial, tetapi juga hak eksplorasi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut. Minyak, gas alam, dan hasil laut lainnya menjadi sumber daya yang sangat diminati di kawasan ini. Kedaulatan laut dan hak eksplorasi menjadi pemicu utama perselisihan antara negara-negara yang berkepentingan di Laut Natuna. Pentingnya Laut Natuna bukan hanya dalam konteks sumber daya alam, tetapi juga dari segi keamanan maritim. Kawasan ini merupakan jalur strategis bagi pelayaran dan perdagangan internasional, sehingga menjadikannya sebagai titik fokus penting dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan regional. Perkembangan dinamis dalam sengketa ini memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas regional secara keseluruhan. Diplomasi maritim menjadi salah satu cara yang paling sering digunakan dalam menangani sengketa wilayah maritim, termasuk sengketa Laut Natuna. Negosiasi bilateral dan multilateral, upaya-upaya memperkuat kerja sama regional, serta pemantauan dan penegakan hukum laut internasional menjadi instrumen yang penting dalam menyelesaikan konflik dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Perairan Natuna yang menjadi surga bagi ratusan jenis satwa, gas, dan minyak juga menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Pada masa Orde Baru, perhatian mulai tertuju pada potensi Natuna. Namun sayangnya, saat itu batas laut Indonesia masih menganut sistem hukum maritim Belanda yang membuat banyak pulau-pulau di Indonesia terpisah dan banyak kapal asing yang melewatinya. Perdana Menteri Indonesia saat itu yang mengetahui hal tersebut membuat Deklarasi Djuanda yang menetapkan bahwa batas negara Indonesia berjarak 12 mil dari garis pantai terluar dan kemudian membuat peraturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang menjadikan laut negara berjarak 200 mil dari garis pantai terluar. Namun perjanjian ini tidak serta merta menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan negara tetangga. Pasalnya, dengan adanya perjanjian tersebut, wilayah Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan sejumlah negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia. Selain itu, ada juga China yang mengklaim sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan yang juga tumpang tindih dengan perairan Indonesia. Akibatnya,

¹ Bernadine Grace Alvania Manek, Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara. Jurnal Lemhannas RI E-ISSN: 2830-5728. Hlm 106

kapal penjaga pantai Tiongkok masuk ke Indonesia dan membuat hubungan Indonesia dan Tiongkok memanas.²

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif yang Dimana dengan peraturan perundang-undangan dan serta analisis, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian hukum yuridis normatif diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini mempunyai usaha mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, dengan norma-norma hukum yang relevan. Oleh karena itu hal ini sering dilakukan oleh perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang-undangan. Peran peneliti adalah untuk mendeskripsikan sebuah norma hukum dan bagaimana hukum itu berlaku. Dalam melakukan itu, peneliti juga dapat memberikan analisis hukum untuk menunjukkan bagaimana ia berkembang dalam hal penalaran yudisial dan pemberlakuannya secara legislatif. Dalam kaitan ini, Penelitian dapat dilihat sebagai penelitian normatif atau teoretis murni.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, Maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klaim kedaulatan teritorial di Laut Natuna mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Pasifik?
2. Bagaimana penyelesaian dari sengketa Laut Natuna terhadap stabilitas keamanan regional, khususnya dalam sumber daya alam?

C. PEMBAHASAN

1. Klaim kedaulatan teritorial di Laut Natuna mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Pasifik

Di Selat Karimata, wilayah paling utara Indonesia dikenal dengan nama Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna adalah sekelompok pulau kecil yang terletak di sebelah perbatasan laut Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Cadangan gas alam terbesar di dunia dan kawasan Asia-Pasifik ditemukan di Kepulauan Natuna. Natuna diperkirakan memiliki cadangan minyak sebanyak 14.386.470 barel dan cadangan gas alam sebanyak 112.356.680 barel. Selain menjadi jalur laut internasional bagi kapal-kapal yang meninggalkan Samudera Hindia untuk mencapai negara-negara industri di sekitar laut tersebut serta Samudera Pasifik, kawasan laut Natuna juga merupakan salah satu Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).³ Sengketa yang berkepanjangan di kawasan Laut Cina Selatan (LTS) dinilai disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulanya. Wilayah LTS disebut memiliki sumber daya alam yang melimpah oleh beberapa peneliti (SKA). Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1968 menaikkan nilai LTS. Diperkirakan terdapat 213 miliar barel minyak di Laut Cina Selatan dan 105 miliar barel di kepulauan Paracel dan Spratly. Gas alam menyumbang antara 60 dan 70 persen hidrokarbon di wilayah tersebut, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). LTS diperkirakan memiliki cadangan gas alam dan minyak terbesar ketujuh

² Context, Kronologi Konflik di Laut Natuna, <https://context.id/read/963/kronologi-konflik-di-laut-natuna>

³ Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Hlm 68

di dunia, menurut perkiraan Administrasi Informasi Energi AS. Mungkin terdapat 190 triliun kaki gas alam di wilayah tersebut. Mungkin ada 11 miliar barel minyak yang disembunyikan di LTS, menurut perhitungan organisasi independen. Selain itu, zona ekonomi eksklusif (ZEE) LTS merupakan rumah bagi berbagai sumber daya ekologi dan perikanan. Kedua, negara-negara asing selalu mendambakan kepemilikannya karena posisinya yang menguntungkan. Kapal-kapal internasional kini sering menggunakan LTS, yang membentang di dua samudera, sebagai titik penyeberangan. menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok, Jepang, Korea, dan negara-negara lain yang melintasi Selat Malaka mulai dari Eropa, Timur Tengah, dan Australia. Selain itu, AS menyatakan tertarik untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Ketiga, perekonomian beberapa negara Asia—khususnya Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara telah tumbuh pesat selama sepuluh tahun terakhir, sementara perekonomian Amerika Serikat dan Eropa mengalami kontraksi. Tiongkok dan AS berlomba-lomba menguasai kawasan LTS demi melindungi kepentingan masing-masing dalam keamanan energi.⁴

Klaim kedaulatan teritorial di Laut Natuna telah menjadi isu yang penting dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Pasifik, terutama dengan Tiongkok. Laut Natuna terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun, klaim kedaulatan Tiongkok atas sebagian besar Laut Natuna, berdasarkan klaim historis yang disengketakan, telah menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok. Pada tahun-tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, termasuk melalui kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal Tiongkok di perairan yang dianggap oleh Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusifnya. Hal ini telah memicu protes keras dari pemerintah Indonesia, yang menegaskan kedaulatan dan hak-haknya atas wilayah tersebut. Ketegangan ini telah memengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok serta negara-negara tetangga lainnya di kawasan Asia Pasifik. Indonesia telah meningkatkan upaya diplomatiknya, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum regional seperti ASEAN, untuk menekankan pentingnya kedaulatan dan integritas wilayahnya. Di sisi lain, Tiongkok juga terus mengampanyekan klaimnya atas Laut Natuna, yang dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Secara lebih luas, klaim kedaulatan di Laut Natuna juga telah mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, karena menimbulkan kekhawatiran tentang eskalasi konflik dan mengganggu stabilitas regional. Sebagai tanggapan, negara-negara lain di kawasan juga telah meningkatkan perhatian mereka terhadap klaim kedaulatan di Laut Natuna dan upaya-upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

2. Penyelesaian Dari Sengketa Laut Natuna Terhadap Stabilitas Keamanan Regional, Khususnya Dalam Sumber Daya Alam

Upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik antara Tiongkok dan Indonesia terkait Kepulauan Natuna. Indonesia harus melakukan tindakan berikut untuk menjaga kawasan Kepulauan Natuna:

1. Memperkuat pengawasan perbatasan regional dengan mempertimbangkan Kepulauan Natuna. Karena batas-batas suatu negara merupakan cara utama dalam mengekspresikan kedaulatan suatu negara, isu-isu yang berkaitan dengan perbatasan negara memerlukan pertimbangan yang cermat. Hal ini mencakup penetapan keamanan dan keutuhan wilayah serta identifikasi batas wilayah atau wilayah

⁴ *Ibid* 63

kedaulatan. Betapa pentingnya pengelolaan perbatasan bagi Indonesia. Selain melakukan kegiatan eksplorasi gas alam dan minyak bumi di Kepulauan Natuna sebagai sarana menunjukkan eksistensi negara Indonesia di kawasan Kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia berupaya menjaga perbatasannya dengan melakukan perundingan perbatasan atau yang disebut dengan border. diplomasi, untuk mendapatkan kejelasan mengenai garis batas Indonesia dengan negara tetangga.

2. Memperluas Kegiatan Perekonomian Kawasan Kepulauan Natuna melalui Eksplorasi Minyak. Pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mengimbangi peningkatan pasokan energi. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap menggunakan sumber energi yang ada saat ini. Wilayah ZEE Indonesia saat ini menyumbang kas negara dan paling banyak menyimpan uang di dalamnya. Kepulauan Natuna adalah rumah bagi salah satu ZEE Indonesia, yang juga merupakan wilayah minyak dan gas alam utama negara ini. Ladang gas D-Alpha yang juga disebut Blok East Natuna terletak tepatnya 225 km sebelah utara Pulau Natuna (dalam ZEEI), dan pemerintah memperkirakan total cadangannya mencapai 222 triliun kaki kubik (TCF). Dari cadangan tersebut dapat diperoleh gas hidrokarbon sebesar 46 TCF sehingga menjadikannya salah satu ladang gas terbesar di kawasan Asia Pasifik dan tiga kali lipat kandungan gas Arun, Aceh. Terkait hal tersebut, Blok Natuna Sea A merupakan kawasan penghasil gas yang terletak di Laut Natuna Barat, dekat dengan perbatasan Indonesia dan Makaysia.

3. Meningkatkan kemampuan pertahanan wilayah Kepulauan Natuna. Mendukung diplomasi merupakan salah satu fungsi alat pertahanan, meskipun diplomasi dipandang gagal. Selain itu, peningkatan kapasitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program pemenuhan kebutuhan minimal untuk bertahan hidup (disebut juga Minimum Essential Force, atau MEF). Selain itu, Tentara Negara Republik Indonesia (TNI) harus terus membangun angkatan bersenjata termasuk armada tempur untuk memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan, khususnya di kawasan Kepulauan Natuna. Berikut kekuatan TNI yang perlu dikembangkan atau diperkuat di Kepulauan Natuna: Membangun pangkalan Sukhoi Su-27. B. Menawarkan 4. Helikopter Apache, AH-64E. B. Memperluas Kodam Bukit Barisan menjadi 1 Batalyon Infanteri. D. Patroli Skuadron Jet Pekanbaru. C. Almabar TNI AL Dapatkan Puluhan Kapal. Keberadaan personel pertahanan TNI yang ditempatkan di Kepulauan Natuna tentu bisa menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia akan bahaya yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Pentingnya mengerahkan kekuatan yang didukung infrastruktur lengkap demi menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penting juga untuk mengingat upaya Indonesia menjaga keamanan dan stabilitas melalui penyelesaian konflik Kepulauan Natuna.

Tinjauan hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa menekankan bahwa tindakan terbaik bagi pemerintah Indonesia adalah mengajukan gugatan terhadap Tiongkok di pengadilan internasional terkait praktik penangkapan ikan ilegal jika ada kemungkinan Tiongkok akan melakukan penangkapan ikan ilegal di Kepulauan Natuna. di masa depan dan jika pemerintah Tiongkok terus menegaskan secara sepihak bahwa Kepulauan Natuna secara historis merupakan bagian dari Sembilan Garis Putusnya. Pendekatan berbasis pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum dikenal sebagai litigasi. Karena saluran diplomatik belum menghasilkan kesimpulan konsensus, solusinya tidak bergantung pada saluran tersebut. Karena Laut Cina Selatan mencakup beberapa negara, konflik ini pada dasarnya bersifat multinasional. Jika diplomasi gagal, negara Indonesia mempunyai pilihan untuk bertindak tegas dan mengajukan gugatan terhadap China. Meski sebelumnya menggunakan jalur diplomatik, Tiongkok terus melanggar peraturan

penangkapan ikan internasional. Hal ini terjadi karena Kepulauan Natuna yang menjadi subyek sengketa dilihat dari beberapa sudut pandang. Tiongkok secara konsisten menegaskan secara sepihak bahwa peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut terjadi di dalam perbatasannya; Namun, pemerintah Indonesia sama sekali tidak mengakui wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya. Pada hakikatnya sengketa perbatasan laut tetap memerlukan kelestarian dan ketaatan terhadap unsur-unsur tertentu baik hukum nasional maupun internasional agar kepentingan nasional tetap menjadi tujuan utama. Begitu pula dengan penyelesaian permasalahan illegal fishing di Kepulauan Natuna tentunya melibatkan unsur dan prinsip hukum internasional.⁵ Jadi konflik kepentingan ekonomi adalah akar permasalahan Laut Cina Selatan, dan kelompok non-pemerintah juga ikut berperan. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk mengambil keuntungan dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk cadangan gas dan terumbu karang. Banyak negara yang ingin mengklaimnya, seperti klaim Tiongkok atas Natuna. Indonesia harus mengambil tindakan berikut untuk menjaga wilayah Kepulauan Natuna 1. Meningkatkan pengelolaan perbatasan wilayah Kepulauan Natuna. 2. Meningkatkan aktivitas perekonomian Kepulauan Natuna dengan melakukan eksplorasi minyak bumi. 3. Memperkuat kapasitas pertahanan wilayah Kepulauan Natuna.⁶

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sengketa di Laut Natuna merupakan bagian dari kompleksitas geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang memiliki implikasi luas, baik dari segi keamanan maritim maupun pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia, sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut, berada di pusat perhatian dalam menangani sengketa ini. Dengan adanya klaim kedaulatan dari negara-negara tetangga, terutama Tiongkok, Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan wilayahnya serta memastikan stabilitas dan keamanan regional. Melalui upaya diplomasi maritim, baik secara bilateral maupun multilateral, Indonesia telah berusaha menyelesaikan sengketa ini dengan negara-negara tetangga. Namun, tantangan tersebut masih berlanjut, dan ketegangan di kawasan tersebut tetap ada. Penguatan kerja sama regional dan penegakan hukum laut internasional menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Laut Natuna. Di samping itu, Indonesia juga perlu memperkuat pengawasan perbatasan, memperluas kegiatan ekonomi di wilayah Natuna melalui eksplorasi sumber daya alam, dan meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini penting untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah Natuna dan untuk memastikan keamanan serta kestabilan di kawasan tersebut.

2. Saran

1. Terus tingkatkan diplomasi maritim: Indonesia perlu terus mengutamakan diplomasi maritim sebagai sarana utama untuk menyelesaikan sengketa di Laut Natuna dengan negara-negara tetangga. Melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif, upaya-upaya diplomasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

⁵ Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti, UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEPULAUAN NATUNA DALAM TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN: 2809-3925 Volume 2 No 3, Juli 2022

⁶ Sara, S. N, Garnita, S, Wulansari, T, & Putri, M. I. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, 591

2. Perkuat kerja sama regional: Indonesia harus terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra regional lainnya dalam mengatasi tantangan keamanan maritim di Laut Natuna. Melalui kerja sama yang erat, Indonesia dapat meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi untuk mengatasi ancaman keamanan di kawasan tersebut.
3. Tingkatkan kemampuan pertahanan: Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah Natuna untuk memastikan keamanan dan kedaulatan nasional. Ini termasuk peningkatan kapasitas militer, termasuk armada tempur dan personel pertahanan yang ditempatkan di Kepulauan Natuna, serta pengembangan infrastruktur pertahanan yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Manek, B. G. A. (2023). Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(2), 105-111.
- Context, Kronologi Konflik di Laut Natuna, <https://context.id/read/963/kronologi-konflik-di-laut-natuna>
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 5(1), 65-75.
- Yanti, N. L. P. M. P. Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 2809, 3925.
- Sara, S. N., Garnita, S., Wulansari, T., & Putri, M. I. (2023). Perspektif Hukum Internasional Dalam Sengketa Laut Natuna: Kasus Indonesia Dan China. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 584-591.